

# MEDIA MASSA DAN TAHUN POLITIK

Riki Arswendi\*

## **Abstract**

*This article discusses the contribution of the mass media amid the current tide of the political year that has taken place in recent months. The media has a role in infiltrating all political events. Therefore, it is expected the mass media can be neutral and balanced in carrying out the function of coverage and reporting. However, this is difficult to achieve because the mass media is owned by certain politicians or political parties. The implication is that there is discrimination coverage and reporting of the media. A number of political parties are very familiar in the eyes of the public, because they often appear on mass media, otherwise political parties that are not affiliated with the mass media are marginalized in the public sphere. This is a small record of the existence of mass media in the era of democracy and political liberalization.*

**Keywords:** *mass media, political year, democracy.*

## **Abstrak**

*Artikel ini mendiskusikan kontribusi media massa di tengah gelombang arus tahun politik yang sedang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Media memiliki peran dalam menginformasikan semua peristiwa politik. Karena itu, diharapkan media massa bisa netral dan berimbang dalam menjalankan fungsi peliputan dan pemberitaan. Namun, hal ini sulit dicapai karena media massa dimiliki oleh politisi atau partai politik tertentu. Implikasinya adalah terjadi diskriminasi peliputan dan pemberitaan yang dilakukan media tersebut. Sejumlah partai politik sangat familiar di mata masyarakat, karena seringnya menghiasi layar kaca, sebaliknya partai politik yang tidak berafiliasi dengan media massa termarginalkan di ruang publik. Inilah catatan kecil eksistensi media massa dalam era demokrasi dan liberalisasi politik.*

**Kata kunci:** *media massa, tahun politik dan demokrasi.*

---

\* Dosen Ilmu Komunikasi, Universitas Mercu Buana, Jakarta

## **PENGANTAR**

Tahun 2017 merupakan tahun media massa. Media massa banyak memberikan informasi mengenai peristiwa politik yang terjadi secara universal. Media massa mengurai peristiwa politik yang bertebaran secara luas, mengglobal, dan rinci. Peristiwa politik yang banyak menyita perhatian berkisar persoalan pertikaian antar-elit politik, soal perebutan kekuasaan melalui pilkada langsung, politisasi SARA dalam pilkada, sorotan media terhadap elit korupsi, drama Setya Novanto yang disiarkan secara eksklusif oleh sejumlah stasiun televisi, hingga kebijakan kontroversial Donald Trump terhadap ibu kota Jerusalem hadir di penghujung tahun 2017. Semua informasi dan peristiwa politik tersebut: hanya mengajarkan kepada masyarakat mengenai kebesaran kaum elit politik [Leirissa, 1994;5] dalam panggung politik. Tidak hanya itu, panggung politik pun menjadi arena pertarungan kuasa para orang besar. Sementara rakyat dan orang kecil termarginal dalam panggung politik. Karena itu, sejarah politik tahun 2017 hanya berkisah tentang peran, pengaruh, kehidupan, dan pergulatan hidup para pembesar negeri ini.

Politik pencitraan selalu dominan ditampilkan para elit politik. Debat dan diskusi publik diberbagai forum tampil begitu rupa dan menawan. Suara keberpihakan dan pembelaan rakyat berhamburan melalui kampanye yang disiarkan media massa. Janji politik ditulis dalam baliho, spanduk, *website*, hingga media sosial secara massif. Diantara janji politik itu, para kandidat kepala daerah beserta tim suksesnya menyelipkan pula berita kebohongan, dan politisasi perbedaan demi memperoleh simpati dan dukungan politik masyarakat [Haboddin, 2015;4]. Tidak berhenti dalam kampanye politik. Bahkan, ketika kepala daerah sedang dilantik dan diambil sumpahnya pun politisasi perbedaan masih dikumandangkan dalam bahasa: pribumi dan non-pribumi kembali menguat dalam wacana politik di DKI Jakarta [Hermansyah, 2017]. Semua ini direkam oleh mata kamera, jurus tulis, dan pewarta media massa.

## **MEMBACA WARNA WARNI POLITIK 2017**

Membaca pemberitaan media massa di sepanjang tahun politik 2017 mengisahkan banyak hal yang patut dicermati secara kritis dan analitik. *Pertama*, media massa sangat agresif dalam memberitakan persoalan korupsi yang masih menjadi tantangan berat dalam pemerintahan Jokowi-Kalla. Meskipun Jokowi berulang kali

mengingatkan agar semua jajaran pemerintahan tidak melakukan korupsi. Namun, faktanya korupsi jalan terus. Lembaga trias politika, kepolisian, tentara, hingga pengusaha terlilit dalam pusaran korupsi. Maraknya persoalan korupsi menjadikan lembaga trias politika, tentara, dan kepolisian tidak dipercaya oleh masyarakat. Mengapa? Karena seluruh pikiran dan kegiatannya dipusatkan untuk menabrak hukum dan aturan demi pengumpulan uang dan harta tanpa batas [Rais, 2008;179]. Tidak hanya itu, tahun 2017 merupakan prestasi bagi KPK karena berhasil memenjarakan Ketua DPR, Setya Novanto. Politisi kawakan dari Golkar, yang pernah lolos dari kasus: Papa Minta Saham; memenangkan peradilan pertama ,pada akhirnya takluk juga. Tertangkapnya Novanto bukan saja menambah daftar politisi korup, tetapi juga merusak citra lembaga perwakilan rakyat. Sebagaimana diungkap dalam Jajak Pendapat *Kompas* [27/11/2017] dalam tabel 1.

**Tabel 1 Citra DPR 2015-2017**

Bulan dan tahun	Baik	Buruk	Tidak tahu
Januari 2015	50,5	48,7	0,8
April 2015	43,5	52,3	4,2
Oktober 2015	49,5	47,6	2,9
April 2016	42,3	51,4	6,3
Oktober 2016	44,7	49,3	6,1
April 2017	36,2	57,8	6,0
Oktober 2017	42,1	52,3	5,6

Bila disimak pada tabel 1 ada dua poin penting yang bisa disimpulkan. *Pertama*, hanya bulan Januari 2015 citra DPR membaik karena di atas nilai 50 persen, selebihnya kurang baik. Bahkan, pada bulan April 2017 citra baik DPR hanya mencapai 36,2 persen. Angka ini merupakan terendah penilaian masyarakat kepada lembaga DPR. *Kedua*, penilaian berbeda terjadi pada bulan April 2017. Karena itu, bulan April 2017 merupakan angka tertinggi penilai buruk masyarakat terhadap DPR. 57,8 persen masyarakat menilai buruk. Sedangkan pada bulan Oktober 2017 lembaga DPR masih dianggap buruk. Implikasinya sudah bisa dibayangkan, yakni penilaian negatif terhadap lembaga ini. Sebagaimana ditulis Sindhunata, [2000;3]:

*Lembaga DPR kita dihuni oleh figur-figur politikus yang kurang berbakat dan ternyata kemampuannya sungguh terbatas, sehingga orang ragu, apakah mereka akan mampu menyelesaikan soal-soal masyarakat yang demikian gawat.*

*Politikus-politikus memiliki keterbatasan kemampuan. Karena itu mereka menjalankan politik sebagai oportunisme belaka. Pikirnya, dengan memainkan kompromi, mereka bisa mempertahankan kekuasaannya. Padahal dalam demokrasi, hanya figur-figur yang kompeten menyelesaikan soal-soal masyarakatlah yang dapat mempertahankan kekuasaannya secara sah.*

Analisis yang tajam, kritis, dan tentu saja memojokkan posisi dan eksistensi anggota DPR sebagai lembaga terhormat. Anggota DPR yang tidak bisa bekerja, tidak layak untuk dipilih kembali sebagai pejabat publik. Perkara kompetensi, meritokrasi, keberpihakan kepada massa pemilih merupakan modal politik, dan kelayakan politik untuk mempertahankan kekuasaan dalam lembaga politik modern.

*Kedua*, media massa memberitakan sebanyak 23 partai politik yang mendaftarkan diri sebagai kontestan pada pemilu 2019. Dari 23 partai politik tersebut, sebanyak 14 partai politik yang menjalani pemeriksaan administrasi dan 9 partai politik yang sedang diteliti administrasinya pasca putusan Bawaslu. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 2.

**Tabel 2. Partai politik yang jalani pemeriksaan administrasi**

No	Nama partai politik
1	Partai Amanat Nasional
2	Partai Berkarya
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	Partai Demokrat
5	Partai Gerakan Indonesia Raya
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia
7	Partai Golkar
8	Partai Hati Nurani Rakyat
9	Partai Keadilan Sejahtera
10	Partai Kebangkitan Bangsa
11	Partai Persatuan pembangunan
12	Partai Nasdem
13	Partai Solidaritas Indonesia
14	Partai Persatuan Indonesia
15	Partai Bulan Bintang

*Kompas*, 11 Desember 2017

Tabel 2 didominasi oleh wajah partai politik lama yang sudah malang melintas menjadi peserta pemilihan. Partai politik lama yang dimaksud adalah partai politik yang pernah ikut dalam pemilihan umum, dan kadernya sudah ada yang menduduki jabatan

politik. Misalnya, Nasdem, Golkar, PPP, PKB, PKS, PAN, Demokrat, PDIP, Hanura, dan Gerindra. Sedangkan partai pendatang baru adalah PPI, PSI, PGPI, dan Karya. Sedangkan tabel 3 memuat 9 partai politik yang sedang diteliti administrasinya. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 3

**Tabel 3. Parpol sedang diteliti administrasinya pasca putusan Bawaslu**

No	Nama partai politik
1	Partai Indonesia Kerja
2	Partai Bhineka Indonesia
4	Partai Islam Damai Aman
5	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
6	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
7	Partai Rakyat
8	Partai Republik
9	Partai Swara rakyat Indonesia

*Kompas*, 11 Desember 2017

Dengan memperhatikan tabel 2 dan 3, maka peta pemilu 2019 akan sangat kompetitif karena diikuti oleh banyak partai politik. Semakin banyak partai politik yang ikut dalam pemilihan, semakin tajam dalam bersaing merebut hati pemilih. Karena itu, kehadiran multi-partai dalam peta politik 2019 bisa ditafsir dalam dua hal. *Pertama*, dari segi demokrasi keberadaan multi partai politik diandaikan akan menampung beragam kepentingan dan aliran politik dalam masyarakat. Partai politik adalah wadah yang diharapkan bisa menampung semua aspirasi dan kepentingan masyarakat. Karena itu, semakin banyak partai politik, semakin bebas masyarakat dalam menentukan pilihannya. *Kedua*, dari segi konflik keberadaan multi partai politik sangat rawan terjadi konflik yang berdasarkan kepentingan, ideologi, dan identitas lainnya. Keragaman tersebut bila tidak dikelola dengan baik akan mudah mengarah pada konflik di aras lokal. Pasca runtuhnya Orde Baru, Indonesia memasuki sistem multi partai. Dengan sistem multi-partai tersebut seringkali terjadi gesekan antar-pendukung dan konflik antar-elit pada level institusi negara.

*Ketiga*, pelaksanaan pilkada serentak 2017 tidak banyak memberikan pengaruh kepada masyarakat Jawa Timur. Meskipun, secara nasional sebanyak 101 daerah yang menyelenggarakan pesta demokrasi, yang terdiri 7 pemilihan gubernur, 18 pemilihan walikota dan 86 pemilihan bupati. Namun, dalam konteks Jawa Timur hanya 1 daerah yang menyelenggarakan pemilihan, yakni Kota Batu. Nuansa politik dalam pilwali bila

dilihat dari permukaan berjalan secara aman, damai, dan tertib. Intensitas konflik tidak banyak terjadi—sebagaimana diwartakan media massa. Hal ini berbeda pada pilkada serentak 2015 yang diikuti sebanyak 19 kabupaten kota/kabupaten dengan diikuti 92 pasangan.

## **DINAMIKA POLITIK 2018**

Peta politik tahun 2018 memang semakin memanas, bila dibandingkan dengan tahun 2017. Sebagian pengamat meyakini sebagai tahun persiapan dalam menuju agenda pemilu legislatif 2019 dan pemilihan presiden. Bila dikaitkan dengan banyaknya jumlah kontestan, maka menjadi wajar bila tahun 2018 merupakan pintu masuk dalam melihat peta politik dalam lanskap politik nasional. Meskipun demikian, peta politik nasional tidak bisa dilepaskan dari pertarungan politik di tingkat lokal. Karena itu, untuk mengira-ngira lanskap politik 2018 bisa digambarkan dalam beberapa argumen pokok.

*Pertama*, media massa mewartakan perhelatan pilkada serentak 2018 akan menjadi tolak-ukur bagi partai politik dalam panggung kekuasaan. Kemenangan partai politik dalam menempatkan kadernya disejumlah pemerintahan daerah merupakan bukti bahwa partai politik tersebut dikenal, memiliki akar ke masyarakat dan tentu saja kader yang diusung populer serta memiliki kapasitas untuk memerintah. Jaringan, popularitas, modalitas, dan kapasitas kader menjadi pertimbangan masyarakat dalam pemilihnya.

*Kedua*, media massa memberitakan bahwa pilkada serentak secara nasional akan diikuti sebanyak 154 daerah. Sebuah jumlah yang sangat besar karena akan diikuti ratusan pasangan calon, dengan memakan biaya yang besar pula. Dengan banyaknya daerah yang mengadakan pilkada serentak, maka kerawanan dan konflik politik akan hadir menyertainya. Untuk mengukur kerawanan dalam pilkada serentak bisa dilihat tiga indikator yakni (i) dari penyelenggara pilkada terdiri dari integritas penyelenggara; profesionalitas penyelenggara; kekerasan terhadap penyelenggara pilkada. (ii) aktor kontestasi terdiri dari proses pencalonan; kampanye; kontestan; dan kekerabatan. (iii). Partisipasi masyarakat yakni (i) penggunaan hak pilih; pengawasan/kontrol masyarakat; karakteristik lokal [*Kompas*, 8/12/2017].

Selain memotret kerawanan pilkada melalui tiga variabel pengukuran—yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah indeks kerawanan pilkada 2018 di tingkat nasional. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 4.

**Tabel 4. Indeks kerawanan pilkada 2018**

No	Provinsi	Peringkat
1	Papua	3,41
2	Maluku	3,25
3	Kalimantan Barat	3,04
4	Sumatra Utara	2,86
5	Sulawesi Tenggara	2,81
6	Kalimantan Timur	2,76
7	Maluku Utara	2,76
8	NTT	2,70
9	Jawa Timur	2,68
10	Sumatra Selatan	2,56
11	NTB	2,55
12	Sulawesi Selatan	2,53
13	Jawa Barat	2,52
14	Riau	2,46
15	Lampung	2,28
16	Bali	2,19
19	Jawa Tengah	2,15

*Kompas*, 8 Desember 2017

Tabel 4 menampilkan kerawanan konflik politik yang bisa meledak pada pilkada serentak 2018. Dari tabel tersebut tiga provinsi yang dinyatakan paling rawan, yakni Papua (3,41), Maluku (3,25), dan Kalimantan Barat (3,04). Sedangkan daerah yang terendah kerawanan konflik politik ditempati Jawa Tengah (2,15) dan Bali (2,19) [*Kompas*, 8/12/2017].

*Ketiga*, pilkada serentak 2018 diprediksi banyak pengamat dan analis akan merebaknya penggunaan politik uang. Politik uang sudah jamak didengar dan bahkan sebagian masyarakat mengakui fenomena politik menjelang pencoblosan pada pilkada. Tetapi, bila ditelisik lebih jauh praktik politik uang tidak sebatas dengan pembelian suara, namun politik uang juga terjadi ketika partai politik meminta miliaran rupiah kepada kandidat yang ingin dicalonkan dalam pilkada. Di Filipina ada perjudian ilegal yang membiayai kampanye para politisi dalam pemilihan. Hal yang sama juga terjadi di

Thailand dengan pembelian suara secara sistematis terjadi pada kepolitikan di tingkat lokal. poinnya adalah:

*Politik uang memastikan kontestasi pemilu, nasional maupun lokal, menjadi lahan bagi mereka yang punya akses terhadap dana dalam jumlah besar; terlepas dari adanya aturan resmi yang mengatur dan membatasi penggunaan dana kampanye dalam demokrasi prosedural. Akibatnya, pola inklusi dan eksklusif sosial dan politik tetap awet dalam demokrasi melalui jalinan kekuasaan predatorial dengan politik uang [Hadiz,2011;126-127].*

Penggalan kutipan di atas memberikan gambaran bahwa politik uang sudah menjadi bagian sentral dalam pemilu maupun pilkada. Media massa sudah lamaewartakan massifnya politik uang. Selanjutnya, analisis Hadiz [Hadiz, 2011;129] menunjukkan praktik politik uang di Indonesia dengan mengatakan:

*banyak bukti yang menunjukkan bahwa para calon bisa dengan mudah menggelontorkan puluhan miliar rupiah dari saku pribadi mereka tapi kalah dalam pilkada. Selain itu,perebutan jabatan kepala daerah, sebut saja di kota-kota niaga dan industri seperti Medan di Sumatra Utara dan Surabaya di Jawa Timur, jelas akan membutuhkan ongkos yang lebih besar ketimbang di kabupaten atau kota yang relatif pinggiran. Kepala daerah di wilayah-wilayah yang kaya sumber daya juga menjadi rebutan dibandingkan daerah-daerah yang miskin sumberdaya—dan karena itu, seorang calon akan terdorong untuk menginvestasikan lebih banyak dana untuk mengamankan kemenangannya. Lagi-lagi, semua kecenderungan itu jelas menguntungkan mereka yang mempunyai akses terhadap dana dalam jumlah besar.*

*Keempat*, pilkada serentak 2018 sudah direncanakan secara matang oleh petahana melalui peningkatan dana sosial. Maksudnya adalah dana sosial akan meningkat tajam dalam jumlah besar dalam APBD. Sebagian besar tersebut untuk digunakan melalui politik pencitraan, sumbangan sosial kepada masyarakat miskin dan lansia, hingga pemberian makan tambahan kepada anak PAUD. Riset yang Perludem di Jawa Timur dan Jawa Barat menunjukkan kemampuan kepada daerah petahana menggunakan dana publik untuk kepentingan politiknya. Misalnya, menggunakan dana publik disamarkan menjadi program/kebijakan populis, sehingga memiliki dasar hukum dan akibatnya tidak mudah dituding penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran dalam pilkada [Tim Perludem, 2014;7].

*Kelima*, kepala daerah petahana memiliki kemampuan dalam mengkondisikan birokrasi pemerintahan daerah. Mulai kepala dinas, hingga kepala desa. Kepala daerah petahana biasanya akan memobilisasi perangkat daerah untuk mendukungnya. Sebagian



perangkat daerah dijadikan tim-sukses, sebagian yang lain membantu agar fasilitas publik bisa digunakan dalam sosialisasi politik kepala daerah [Haboddin, 2016;162]. Untuk mengikat loyalitas dukungan birokrasi kepada petahana, maka dijanjikan posisi sebagai imbalannya. Sedangkan kepala desa dijanjikan perbaikan kantor, kesejahteraan, dan dukungan finansial bila ikut bertarung kembali dalam pilkades.

*Keenam*, dalam konteks Jawa Timur, pilkada serentak 2018 akan diikuti sebanyak 18 kabupaten/kota dan 1 pemilihan gubernur. Jadi, total kepala daerah yang akan habis masa jabatannya 19 daerah. Karena diikuti 19 daerah, maka tensi politik akan lebih dinamis pergerakannya. Koalisi partai politik akan semakin ramai khususnya dalam pilkada gubernur. Apalagi, yang bertarung dalam pilgub adalah musuh politik lama: Saifullah Yusuf dan Khofifah Indar Parawansa.

## **CATATAN KRITIS**

Tahun politik yang jatuh pada 2018 diharapkan jauh lebih damai dan stabil bila dibandingkan dengan tahun 2017. Gejolak politik dan politisasi identitas diharapkan tidak banyak dilakukan oleh politisi, partai politik, lembaga eksekutif, lembaga kemasyarakatan, dan *stateholder* lainnya. Perebutan jabatan kepala daerah yang akan diikuti 171, dan dijadwalkan jatuh pada tanggal 27 Juni 2018 bisa berjalan lancar bila semua kontestan, calon kepala daerah, penyelenggara pilkada, masyarakat pemilih, dan media massa bersatu-padu dalam hal. *Pertama*, memaknai pilkada sebagai proses politik biasa. Suksesi kepemimpinan merupakan tradisi politik purba dalam kajian pemerintahan. Dalam kajian pemerintahan dikenal tiga model suksesi pemerintahan, yakni suksesi secara turun-temurun yakni jabatan dialihkan kepada keturunan atau anggota keluarga pemegang jabatan terdahulu; suksesi pemerintahan secara paksa yakni suatu jabatan yang dialihkan kepada orang lain dengan menggunakan kekerasan berdarah, atau ancaman paksa, dan pengerahan massa; suksesi pemerintahan dengan pemilihan dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat yang berhak memilih melalui mekanisme pemilihan [Surbakti, 1998;25-26].

*Kedua*, membangun komitmen diantara kontestan, penyelenggara pilkada, masyarakat pemilih, dan media massa untuk mengawal pilkada serentak 2018 bisa berjalan damai, adil, dan bebas. Pilkada damai, adil, dan bebas merupakan harapan bagi

semua masyarakat Indonesia. Karena itu, komitmen politik untuk mengawal dan mensukseskannya merupakan harga mati.

*Ketiga*, pada tingkatan akar rumput, masyarakat pemilih harus diedukasi secara terus-menerus oleh media massa dalam rangka memperkuat rasionalitas politis [Hilmy,2017] mereka dalam menggunakan hak-hak politiknya dalam pilkada serentak. Keikutsertaan masyarakat dalam menggunakan hak pilih dan memilihnya merupakan bentuk kesadaran politik yang dijamin dalam konstitusi. Jajak Pendapat Kompas menyebutkan kesan masyarakat ketika mendengar frasa pilkada bisa ditampilkan pada tabel 5.

**Tabel 5. Kesan masyarakat ketika mendengar frasa pilkada**

Frasa pilkada	Persentase
Ramai kampanye di jalan raya	29,2
Ajang untuk menjadi bagian dari demokrasi	33,1
Banjir sumbangan dari pasangan calon	11,1
Serangan fajar dengan bagi-bagi uang	22,4
Tidak tahu	4,2

*Kompas*, 4 Desember 2017

Kesan masyarakat sebagaimana dipotret koran *Kompas* pada tabel 5 merupakan bentuk pemahaman tentang pilkada. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat dewasa, rasional, dan memiliki pengetahuan politik yang baik. Bila diperiksa tabel 5 sebanyak 33,1 persen masyarakat mengetahui pilkada sebagai ajang demokrasi, 29,2 persen pilkada sebagai kampanye dan 22,4 pilkada sebagai serangan fajar. Memaknai pilkada sebagai serangan fajar merupakan bentuk rasional masyarakat pemilih terhadap pesta demokrasi. Pemaknaan ini lahir dan tumbuh dari perilaku atau kebiasaan elit politik menabur uang dalam membujuk hati pemilih.

*Keempat*, perlu meningkatkan komunikasi politik dan kerjasama antar-partai politik dalam menyongsong pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019. Komunikasi politik dan kerjasama tersebut sangat penting dilakukan dalam rangka mempermudah persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan pilkada serentak dan pemilihan umum mendatang. *Kelima*, mengawali dialog berkelanjutan mengenai pentingnya ‘garis *start*’ yang sama bagi partai politik yang ada. Dalam sistem multi partai politik, sudah sewajarnya apabila partai politik lama dan yang baru bertolak dari garis *start* yang sama dan tidak ada yang memiliki *privelese* yang lebih dari yang lainnya [Amal, 1998;2].

Pendapat Amal secara normatif bisa diterima, tetapi fakta faktual sering berbeda. Sejak partai politik ditetapkan sebagai kontestan pemilu 2019, berlomba-lomba menampilkan diri di sejumlah media massa. Meskipun demikian, partai politik yang diuntungkan dan semarak beriklan bila pemiliknya memiliki media massa. Lihatlah Golkar yang sering muncul di ANTV, Nasdem di Metro TV, Perindo di RCTI dan Global. Semarak kehadiran partai politik di TV tidak bisa dilepaskan dari kepemilikan. Dengan demikian, maka himbauan agar partai politik bermula pada ‘garis *start*’ yang sama dalam menyongsong tahun politik 2018 menjadi tidak relevan.

Di era keterbukaan dan liberalisasi politik, kontribusi media massa sangat besar perannya dalam mengawal tahun politik 2018. Media massa bukan saja menjadi pilar demokrasi, tetapi menjadi aktor penting dalam menyejukkan tensi politik yang kian memanas. Karena itu, media massa diharapkan bisa memberitakan atau menginfokan kejadian/peristiwa politik dengan berpijak pada kode etik jurnalistik. Tujuannya, agar media massa dituntun untuk mengedepankan tanggungjawab dalam mendidik masyarakat secara cerdas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Ichlasul.1998. 'Dialog antar-Partai Politik Tentang Pemilu', Makalah yang disampaikan pada tanggal 5-6 Desember.
- Haboddin, Muhtar. 2015. *Politik Primordialisme*, Malang: UB Press.
- Haboddin, Muhtar. 2016. *Dinamika Pilkada dan Demokrasi Lokal di Indonesia* Malang: UB Press.
- Hadiz, Vedi R. 2011. 'Demokrasi dan Politik Uang: Pelajaran dari Indonesia' *MAARIF*, Vol.6. No.1-April.
- Hermansyah, Despan.2017. 'Potensi Konflik Pilkada' *Kompas*, 12 Desember.
- Hilmy, Masdar. 2017. 'Mengelola Politik Identitas' *Kompas*, 23 November.
- Kompas*, 'Benih Kerawanan di Semua Pilkada', 8 Desember 2017.
- Kompas*, 8 Desember 2017
- Leirissa, Richard Z. 1994. 'Sejarah Indonesia Modern' *PRISMA*, 10, Oktober.
- Rais, Amien. 2008. *Selamatkan Indonesia*.Jogjakarta: PPSK Press.
- Sindhunata,2000. 'Demokrasi Kenes-Kenesam' *BASIS*, 07-08, Tahun ke-59.
- Surbakti, Ramlan. 1998. *Reformasi Kekuasaan Presiden*. Jakarta, Grasindo.
- Tim Perludem, 2014. *Penggunaan Dana Publik untuk Kampanye*, Jakarta, Perludem.
- Yuniarto, Topan.2017. 'Memotret Lagi Wajah DPR Masa Kini', *Kompas*, 27 November.